

Ekonomi dalam Lumpur

Oleh B HERRY PRIYONO

Di awal September 2006, tiga bulan setelah lumpur Sidoarjo tidak terkendali, muncul desakan ganjil agar pemerintah menyatakannya sebagai bencana nasional. Tak jelas siapa yang memulai gerakan itu. Barangkali maksudnya mulia, agar para korban mendapat perhatian serius. Namun, maksud baik itu punya dampak legal yang fatal.

Salah satunya, biaya perbaikan infrastruktur dan kompensasi akan terbebani ke anggaran pemerintah sebab apa saja yang berbunyi "nasional" berakibat pada pemerintah sebagai penanggung, sebagian atau seluruhnya. Desakan itu mungkin akan muncul lagi, tetapi sebaiknya kita tidak mendukungnya.

Ada yang menyedihkan bagaimana tragedi itu bermula. Seperti yang terjadi dalam banyak relasi antara perusahaan dan masyarakat setempat, persoalannya selalu dianggap "biasa". Apa yang terjadi antara Freeport dan warga setempat? Atau antara Newmont dan warga Buyat? Semua pernah meledak dan tetap bermasalah, tetapi kemudian terselip dalam *headlines* berikutnya. Begitulah persekongkolan diam.

Tetap pencurian

Jika tragedi itu secara langsung disebabkan instansi negara, deretan kritik segera menyergap pemerintah. Namun, bila penyebab langsungnya perusahaan, mendadak terjadi diam yang panjang. Lalu, para komentator dan "bintang media" teragap-gagap lantaran tidak menemukan kata. Andaiapun menemukan kata, tak jelas siapa yang dituntut menanggung beban reparasi kerusakan dan kompensasi bagi para korban. Atau, seperti memutar lagu lama, tidak sedikit yang langsung menuntut pemerintah sebagai pihak yang

bertanggung jawab.

Sebaiknya ditegaskan, beban dan biaya reparasi infrastruktur serta kompensasi bukan tanggungan pemerintah, tetapi tanggungan perusahaan yang terlibat. Tentu saja rincian lain tertera dalam kontrak, tetapi ketegasan posisi ini perlu dipegang sejak awal. Bila tidak, muncul risiko terulangnya kasus pencurian uang rakyat ala skandal BLBI. Cara bisa berbeda, tetapi tetap pencurian.

Posisi tegas itu juga perlu sebab apa yang dihadapi adalah kecenderungan patologis perusahaan untuk melakukan eksternalisasi biaya. Ini bukan hal baru. Setiap mahasiswa/i ekonomi mempelajarinya dalam konsep 'eksternalitas' (*externalities*). Istilah abstrak itu hanya punya arti riil jika kita tahu intinya. Intinya adalah prinsip "laba milikku, biaya urusan orang lain". Dan istilah "orang lain" bisa berupa beban pada konsumen, hidup warga setempat, pajak kita, anggaran negara, dan sebagainya.

Andaikan perusahaan pengeboran gas melakukan eksplorasi. Salah satu prasyarat mutlak keamanan teknis-geologis adalah memakai *casing* dengan diameter dan ketebalan tertentu. Untuk menghemat biaya, prasyarat mutlak itu tidak dipenuhi. Kemudian terjadi malapetaka: lumpur dari perut bumi menyapu ratusan hektar wilayah. Awalnya ekonomi, akhirnya lumpur. Hidup penduduk hancur, jalan-jalan terendam, dan arus kehidupan di kawasan itu lumpuh total. Pada mulanya adalah 'eksternalisasi biaya'.

Namun, bukankah penciptaan lapangan kerja oleh perusahaan yang sama juga hasil eksternalitas yang berguna? Benar! Namun, puja-puja atas eksternalitas positif itu rupanya telah mengabaikan fakta brutal bahwa banyak tragedi dan kehancuran lingkungan juga berasal dari prinsip eksternalitas yang sama. Selain itu, klaim eksternalitas dalam bentuk penciptaan lapangan kerja rupanya juga tinggal buih

verbal. Jika data Bappenas benar, 1 persen pertumbuhan ekonomi di tahun 2006 hanya menyerap 42.000 pekerja, rontok dari 178.000 (2005) dan 248.000 (2003).

Soalnya lebih rumit, dan kerumitan itu berakar dari psikologi kolektif kita. Menunjuk banyak tragedi yang disebabkan oleh tindakan eksternalisasi biaya perusahaan tentu tidak populer. Padahal, populer atau tidak populer bukanlah soalnya. Fakta degil yang muncul dari kinerja eksternalisasi biaya itu jelas-jelas terjadi, dan akan terus berulang bila tidak ditemukan solusi. Kita teragap bukan lantaran fakta itu tidak terjadi, tetapi karena kita hidup di zaman di mana para investor dan eksekutif bisnis dilihat sebagai para pangeran atau putri kerajaan yang gagah menunggang kuda putih. Kita dan pemerintah tunduk-tunduk gugup, terkesima sampai tidak berani bertanya. Untuk menutupi diri, kemudahan minggat para investor dalam globalisasi ekonomi lalu dipakai sebagai alibi.

Melawan alibi

Mungkin pokok-pokok di atas terdengar naif lantaran menyederhanakan persoalan. Mungkin! Cuma, pada saat yang sama, perlu diakui bahwa perumitan cara mengurai persoalan suka membuat kita lupa mengenali jantung masalah. Jantung masalahnya adalah gerakan untuk membuat perusahaan mengurangi tindakan eksternalisasi biaya. Secanggih apa pun caranya, biaya yang dihemat perusahaan melalui eksternalisasi pasti akan muncul di tempat lain dalam bentuk lain. Istilah "di tempat lain dalam bentuk lain" bisa berupa kerusakan ekologi, pencurian anggaran pemerintah, pajak kita, pengungsian penduduk, dan semacamnya. Maka, intinya terletak dalam gerakan mencegah tindakan eksternalisasi biaya yang berakibat merusak kehidupan banyak orang.

Yang menarik adalah hubungan problematis antara kinerja perusahaan dan

hidup warga setempat itu terjadi dalam bayang-bayang banyak diskusi yang belakangan ini gencar dilakukan mengenai tanggung jawab perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*). Semua wacana itu baik adanya, tetapi belum menusuk jantung soalnya, yaitu CSR bukan sekedar tindakan amal dan bukan pula kehendak sosial perusahaan untuk beramal. CSR bukan perkara kemauan atau ketidakmauan perusahaan. Jika ingin melihat apakah CSR mulai dipraktikkan, simaklah seberapa besar/kecil eksternalisasi biaya yang dilakukan perusahaan-perusahaan dan siapa yang kena dampak.

Sebelum perkara itu dibuka kepada publik, mungkin mubazir bicara tentang agenda lanjut CSR. Cuma, penyingkapan publik itu tentu akan dihindari perusahaan. Kehendak baik adalah kemewahan. Maka, terpaksa yang tersisa hanyalah desakan, dan caranya bisa bermacam. Andaikan kinerja suatu perusahaan merusak lingkungan dan kehidupan warga setempat, kita bisa mengambil kertas, lalu membuat beberapa kolom. Kolom pertama berisi nama-nama produk perusahaan itu. Kolom kedua berisi daftar barang/jasa produk-produk tersebut. Kolom ketiga berisi daftar merek barang/jasa beserta contoh visualnya. Kolom keempat bisa berisi rincian pasar, pembeli, target lokal, nasional, global, dan seterusnya.

Untuk apa? Untuk gerakan publik memboikot produk sampai perusahaan melakukan reparasi. Cara ini tidak melanggar hukum, bahkan menggunakan logika pasar yang persis dididungkan oleh *think-tank* yang ditaburi uang pemilik perusahaan itu. Strategi ini sudah biasa dipakai di banyak negara, dan urusan siasat adalah soal imajinasi. Justru mengherankan kita belum coba melakukannya.

Jadi, tunggu apa lagi?

B HERRY PRIYONO
Dosen pada Program Pascasarjana
STF Driyarkara, Jakarta